

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Imigran merupakan sekelompok orang asing yang melakukan perjalanan dari negara asalnya ke negara lain bertujuan untuk mencari perlindungan dari konflik serta permasalahan yang terjadi di negara asalnya. Para imigran ini juga mendapatkan status hukum yang berbeda sesuai peraturan dan kebijakan yang diterapkan negara penerimanya.¹ Namun tak jarang para imigran ini masuk ke negara tujuan tanpa melakukan pemeriksaan dan dokumen yang sah dalam mendukung status hukum imigran yang akan diterimanya dan para imigran ini dianggap sebagai imigran ilegal. Selain itu, imigran yang sudah mendapatkan status dan izin untuk tempat tinggal bekerja di negara tujuan bisa berstatus menjadi imigran ilegal jika tidak melakukan perpanjangan visa tempat tinggal dan kerja.²

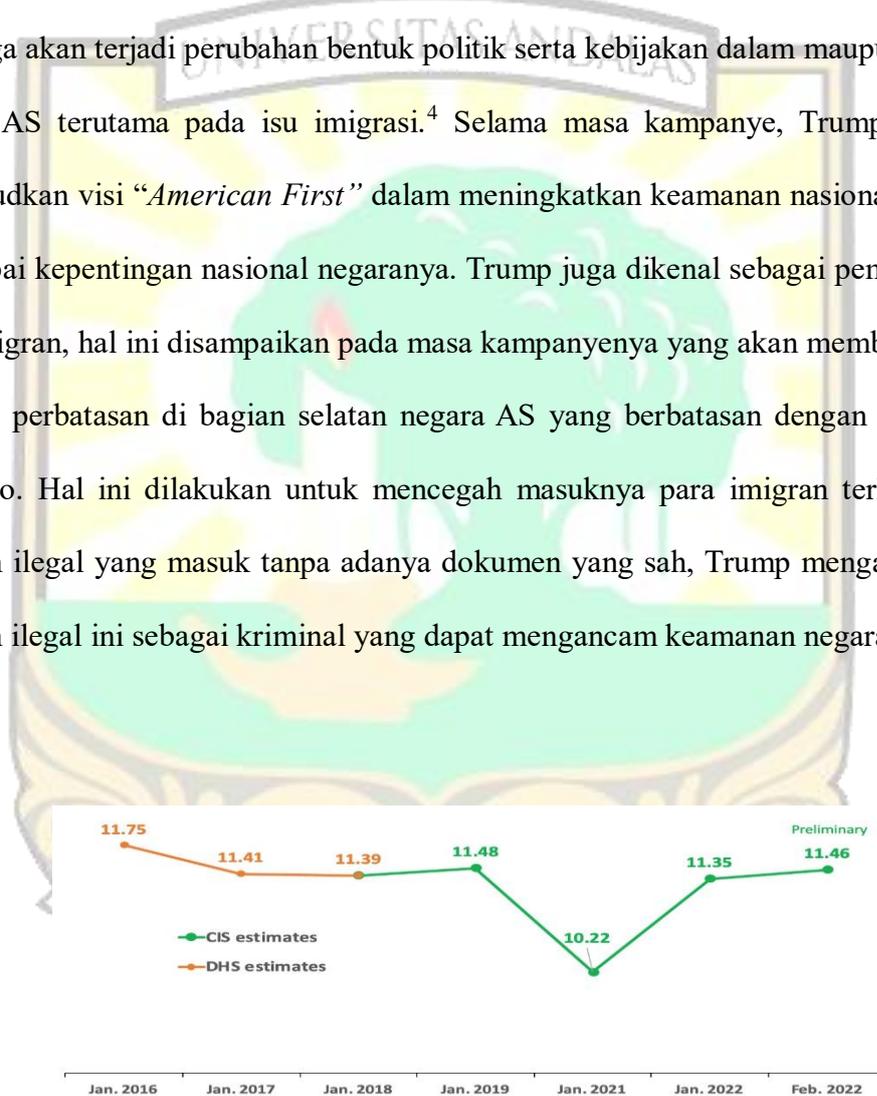
Amerika Serikat (AS) merupakan negara maju dengan pemerintahan yang bersifat demokratis menjadi negara penerima imigran terbanyak di dunia. AS sebagai negara demokratis tentu menjunjung tinggi nilai-nilai fundamental seperti Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi daya tarik dan tujuan para imigran dari negara asing untuk masuk ke dalam negara AS. Para imigran tersebut ingin meningkatkan kesejahteraan hidup dan mencari perlindungan dari konflik dan penganiayaan yang terjadi di negara asalnya. Sehingga presiden AS lebih berfokus pada isu imigran

¹ Jessica Bolter, "Explainer: Who Is An Immigrant?", *Migration Policy Institute*, Accessed Maret 02, 2024, <https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/Explainer-WhoIsAnImmigrant-PRINT-Final.pdf>

² "Illegal Immigrant", *Legal Information Institute*, Accessed Maret 02, 2024, https://www.law.cornell.edu/wex/illegal_immigrant

dan membuat kebijakan yang sesuai dengan undang-undang imigrasi AS untuk melindungi hak-hak para imigran tersebut.³

Donald Trump resmi menjadi Presiden ke-45 Amerika Serikat yang dilantik pada 20 Januari 2017 oleh Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat John Roberts, sehingga akan terjadi perubahan bentuk politik serta kebijakan dalam maupun luar negara AS terutama pada isu imigrasi.⁴ Selama masa kampanye, Trump ingin mewujudkan visi “*American First*” dalam meningkatkan keamanan nasional serta mencapai kepentingan nasional negaranya. Trump juga dikenal sebagai pemimpin anti-imigran, hal ini disampaikan pada masa kampanyenya yang akan membangun tembok perbatasan di bagian selatan negara AS yang berbatasan dengan negara Meksiko. Hal ini dilakukan untuk mencegah masuknya para imigran terkhusus imigran ilegal yang masuk tanpa adanya dokumen yang sah, Trump menganggap imigran ilegal ini sebagai kriminal yang dapat mengancam keamanan negara AS.⁵



Gambar 1.1 Populasi Imigran Ilegal tahun 2016-2022

Sumber: Departemen of Homeland Security and Center for Immigration Studies

³ Claire Klobucista, Amelia Cheatham dan Diana Roy, “Backgrounder the US Immigration Debate” *Council Foreign Relation*, 2023

⁴ “Donald Trump Resmi Dilantik Jadi Presiden AS ke-45”, *tirto.id*, Accessed Maret 02, 2024, <https://tirto.id/donald-trump-resmi-dilantik-jadi-presiden-as-ke-45-chrf>

⁵ “Donald Trump presidential campaign 2016,” *Ballotpedia*, Accessed Maret 02, 2024, https://ballotpedia.org/Donald_Trump_presidential_campaign_2024

Berdasarkan laporan *Department of Homeland Security (DHS)* dan *Center for Immigration Studies (CIS)* pada tahun 2016 terdapat sekitar 11,75 juta imigran ilegal yang ada di AS. Kemudian pada tahun 2017 imigran ilegal mengalami penurunan sekitar 11,41 juta jiwa dan tahun 2018 juga mengalami penurunan sebanyak 11,39 juta jiwa. Namun pada tahun 2019 kembali mengalami kenaikan sebanyak 11,48 juta jiwa dan tahun 2020 imigran ilegal yang ada di AS tidak tercatat akibat wabah covid 19. Dan di tahun 2021 imigran ilegal tercatat mengalami kenaikan sebanyak 10,22 juta jiwa diakibatkan oleh wabah covid 19 serta pelarangan perjalanan untuk mengurangi penyebaran virus covid 19 tetapi pada tahun 2022 imigran ilegal kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebanyak 11,35 juta jiwa.

Sehingga hal ini mendasari sikap Trump dalam mewujudkan “American First” yang terdapat dalam pidato kampanye presiden 2016 untuk melindungi keamanan nasional AS serta pembentukan kebijakan migrasi yang dapat menekan angka imigran ilegal yang disebut sebagai ancaman bagi AS. Kebanyakan para imigran ilegal tersebut berasal dari negara Amerika Tengah seperti Honduras, Guatemala dan El Salvador yang memasuki AS melalui perbatasan dengan cara yang ilegal atau tanpa penggunaan dokumen yang sah. Faktor peningkatan imigran ilegal ini disebabkan karena adanya konflik serta permasalahan yang sedang terjadi di negara asalnya berupa kekerasan, kesenjangan ekonomi, kemiskinan yang mendasari para imigran tersebut untuk mencari perlindungan serta kesejahteraan di negara AS yang dianggap bisa memenuhi hal tersebut.

Namun pada tahun 2017 setelah pelantikan Trump sebagai presiden AS mulai mengalami penurunan tingkat imigran ilegal akibat sikap Trump yang cukup

keras dan tegas dalam menangani isu migrasi yang ada di AS. Salah satu bentuk sikap Trump dalam isu migrasi berupa pemimpin yang anti imigran sehingga kebijakan-kebijakan migrasi yang akan diberlakukan dapat mengimplementasikan tujuan Trump untuk menekan angka imigran ilegal serta mencegah ancaman imigran Trump terhadap keamanan negara AS. Tetapi pada tahun 2018 sampai 2019 mengalami kenaikan imigran ilegal dari 11,39 juta imigran ilegal menjadi 11,48 juta imigran ilegal sehingga Trump mengambil sikap yang tegas dalam menetapkan kebijakan migrasi AS agar para imigran ilegal tersebut tidak bisa memasuki AS secara ilegal serta harus mematuhi kebijakan migrasi yang berlaku selama pemerintahan Trump.⁶

Dalam menanggapi krisis kenaikan imigran ilegal yang terjadi di perbatasan AS-Meksiko, Trump sebagai presiden menerapkan beberapa kebijakan yang cukup kontroversial dalam menangani isu imigran ilegal ini. Salah satu kebijakannya yaitu Kebijakan Migrant Protection Protocol (MPP) atau disebut '*Remain in Mexico*' yang diresmikan pada Januari 2019 yang bertujuan untuk menurunkan angka imigran ilegal yang terjadi di AS. Kebijakan Migrant Protection Protocol (MPP) atau disebut '*Remain in Mexico*' ini merupakan tindakan pemerintahan AS untuk mengembalikan para imigran yang masuk secara ilegal melalui perbatasan untuk menunggu dan menetap di negara Meksiko selama proses imigrasinya berlangsung.⁷ Kebijakan MPP ini diterapkan untuk menjaga serta melindungi keamanan warga dan negara AS.⁸

⁶ Amadu Jacky Kaba, "United States Immigration Policies in the Trump Era", *Scientific Research*

⁷ "Migrant Protection Protocol," *Homeland Security*, Accessed Maret 05, 2024, <https://www.dhs.gov/archive/news/2019/01/24/migrant-protection-protocols>

⁸ Diana Roy, "Why Biden Is Restarting the Trump-Era 'Remain in Mexico' Program", *Council Foreign Policy*, 2022

Sejak diberlakukannya kebijakan MPP, Trump berhasil menurunkan sekitar 1,26 juta imigran ilegal dari tahun 2019 sampai tahun 2021 yang masuk melalui perbatasan AS-Meksiko. Kebijakan MPP tersebut efektif dalam pengimplementasiannya, Namun kebijakan MPP ini justru melanggar hak asasi manusia terhadap para imigran. Kebijakan MPP atau '*Remain in Mexico*' dianggap sebagai upaya dasar Trump dalam menghapus sistem suaka AS serta melanggar hukum dan praktik pengungsi AS. Maka dalam hal ini akan berdampak pada kegagalan Trump terhadap proses dan pengadilan migrasi AS.⁹

Kebijakan MPP menjadi salah satu kebijakan yang paling kontroversial pada masa pemerintahan Trump sebab tindakan yang terdapat dalam kebijakan MPP tersebut melanggar HAM para imigran yang ingin mencari perlindungan, namun dalam kebijakan ini para imigran tersebut justru tidak memperoleh hak nya dalam mendapatkan perlindungannya. Implementasi kebijakan MPP merupakan cerminan sikap tegas Trump dalam menyikapi krisis imigran ilegal yang terjadi di perbatasan AS-Meksiko. Hal ini membuktikan sikap Trump yang anti-imigran. Trump juga seorang presiden AS yang bukan dari kalangan politik melainkan kalangan pengusaha dan selebriti berhasil memunculkan kontroversi dan membentuk opini publik mengenai perubahan kebijakan imigrasi yang cenderung berusaha untuk menghilangkan para imigran.¹⁰

Latar belakang Trump yang berasal dari partai republik dan bukan dari kalangan politik melainkan pengusaha berhasil menarik perhatian kalangan

⁹ "Remain in Mexico," Human Right Watch, Accessed Maret 02, 24, <https://www.hrw.org/tag/remain-mexico>

¹⁰ "The Perils of Trump's Authoritarian Leadership Style," *Psychology Today*, Accessed Maret 06, 2024, <https://www.psychologytoday.com/intl/blog/presence-mind/201901/the-perils-trump-s-authoritarian-leadership-style>

masyarakat AS. Dengan latar belakang tersebut, justru mengantarkan Trump menjadi seorang Presiden AS menjadikannya sebagai fenomena politik. Trump juga berada dalam aliran *populism/nasionalism* yang berkeinginan untuk mendahulukan kepentingan nasional negaranya dan tidak terlalu mengutamakan pandangan dunia seta melawan ancaman domestik demi terealisasinya keputusan maupun kebijakan yang sudah diambil. Trump meletakkan rakyat diatas politik sehingga tidak heran jika setiap kebijakan yang dibuat oleh Trump lebih mementingkan kepentingan negara AS yang berdasarkan pada tujuan visi “*American First*”.¹¹

Berdasarkan pemaparan diatas, Trump sebagai presiden AS melalui kebijakan “*American First*” berkeinginan untuk melindungi keamanan nasional negara AS terutama dari imigran ilegal yang masuk melalui perbatasan AS-Meksiko. Kebijakan MPP ini tidak mencerminkan AS sebagai negara demokratis dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, justru diterapkannya MPP tersebut melanggar HAM para imigran. Dengan latar belakang Trump sebagai seorang pengusaha dan bukan seorang politikus berhasil menyita perhatian kalangan masyarakat nasional dan internasional dalam upaya menangani imigran ilegal yang ada di perbatasan AS-Meksiko melalui kebijakan MPP atau ‘*Remain in Mexico*’. Oleh karena itu, Peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana Gaya Kepemimpinan Donald Trump dalam Kebijakan Migrant Protection Protocol di perbatasan AS-Meksiko.

¹¹ Jeff Taylor, “Historical and Ideological Context of Donald Trump”, *Dordt Digital Collections*, 2016:1-18

1.2 Rumusan Masalah

Donald Trump diangkat menjadi presiden Amerika Serikat dengan latar belakang seorang pengusaha bukan dari kalangan politik. Pada kampanye calon presiden tahun 2016, Trump menyampaikan pidato yang membahas mengenai isu-isu imigran ilegal yang ada di perbatasan AS-Meksiko. Pada upaya penurunan tingkat imigran ilegal tersebut, Trump membuat kebijakan Migrant Protection Protocol (MPP) atau disebut '*Remain in Mexico*'. Kebijakan MPP menjadi kebijakan yang cukup kontroversial dalam pengimplementasiannya. Dengan pengaruh individu Trump dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan yang kontroversial dalam menangani isu imigran ilegal menarik untuk diteliti, mengingat Trump adalah presiden AS yang berasal dari partai republik dan bukan berasal dari kalangan politik melainkan seorang pengusaha.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dari penjelasan pada rumusan masalah diatas, maka pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana gaya kepemimpinan Presiden Donald Trump dalam kebijakan Migrant Protection Protocol (MPP) di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan gaya kepemimpinan Donald Trump dalam kebijakan Migrant Protection Protocol di perbatasan Amerika Serikat – Meksiko

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis

Diharapkan penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan studi Hubungan Internasional bagi mahasiswa, terutama bagi mahasiswa Hubungan Internasional khususnya dalam memahami serta menganalisis gaya kepemimpinan Presiden Donald Trump dalam kebijakan Migrant Protection Protocol (MPP) di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain dalam mengangkat tema yang sama namun dalam teori dan sudut pandang yang berbeda.

1.6 Studi Pustaka

Kajian pustaka pertama, penulis merujuk pada jurnal yang berjudul *U.S. Immigration: The Origins and Evolution of Contemporary Issues and the Architecture of Future Reform* yang ditulis oleh Andrew Dominick Beaulieu tahun 2014. Dalam tulisan ini membahas pada tahun 1964 Kongres AS memperdebatkan terkait perubahan rancangan undang-undang imigrasi dalam upaya penanganan isu-isu yang berkaitan dengan sistem maupun para imigran yang sedang melakukan kegiatan imigrasi di negara AS. RUU imigrasi ini diberi nama undang-undang Hart-Celler tahun 1965, Undang-undang Hart-Celler ini dibuat untuk menghapus sistem kuota yang ada pada kebijakan imigrasi AS sebelumnya.

Undang-undang ini diusulkan untuk mengubah identitas nasional dalam sistem imigrasi yang berdampak terhadap peningkatan imigran, tetapi di satu sisi

terjadi peningkatan imigran akan berdampak negatif terhadap perekonomian AS. Wakil Presiden William Miller berpendapat bahwa UU ini akan diuji coba, jika terjadi peningkatan imigran sebanyak tiga kali lipat maka UU ini akan dicabut sehingga dikhawatirkan RUU ini akan menyebabkan kelebihan populasi dan memperburuk perekonomian AS. UU Hart Celler ini tetap didukung untuk meningkatkan efektivitas Amerika Serikat sebagai negara demokrasi dalam menjunjung hak asasi manusia terkhusus untuk para imigran. UU Keimigrasian tahun 1965 ini mendukung hak-hak sipil menuju kesetaraan tanpa membedakan dan juga sebagai upaya dalam menghilangkan diskriminasi terhadap imigran yang terdapat dalam sistem kuota pada tahun 1924.¹²

Dalam jurnal ini membantu penulis dalam melihat cara kerja sistem imigrasi zaman dahulu dalam upaya penanganan isu imigrasi yang terjadi di AS. AS sebagai negara demokrasi dengan tingkat penerima imigran terbesar di dunia tidak seharusnya melakukan kebijakan imigrasi yang berdampak terhadap diskriminasi dan melanggar hak asasi manusia terhadap pada imigran yang ingin mendapatkan perlindungan serta kesejahteraan melalui negara penerimanya. Setiap imigran mendapatkan hak yang sama dalam sistem imigrasi AS. Selain itu, peneliti juga dapat melihat bagaimana presiden AS dalam melakukan perubahan kebijakan imigrasi AS yang terjadi dari presiden terdahulu sampai presiden yang sekarang.

Kajian pustaka kedua, penulis merujuk pada jurnal yang berjudul *Illegal Immigration: The Trump Effect* yang ditulis oleh Mark Hoekstra dan Sandra Orozco Aleman pada tahun 2021. Dalam tulisan ini membahas mengenai kebijakan serta

¹² Andrew Dominick Beale, "U.S. Immigration: The Origins and Evolution of Contemporary Issues and the Architecture of Future Reform," 2014

penegakkan hukum yang dibuat oleh Trump dalam mengatasi imigran ilegal yang ada di perbatasan AS-Meksiko. Hal ini juga yang disampaikan Trump saat melakukan kampanye untuk menjadikan isu imigrasi menjadi isu yang penting untuk diatasi demi menjaga keamanan negara AS dari kejahatan para imigran yang masuk secara ilegal. Bukan hanya itu, Trump juga akan membangun tembok perbatasan AS-Meksiko untuk menghalangi para imigran berusaha masuk ke negara AS secara ilegal tanpa adanya dokumen yang resmi.

Selain itu, jurnal ini juga membahas perubahan kebijakan imigrasi pada terdapat masa Trump dan Obama dalam upaya penanganan isu imigran. Trump dengan kebijakannya yang kontroversial ini menganggap para imigran tersebut sebagai pembuat kriminal seperti penyebar narkoba, kekerasan terlebih lagi yang berasal dari Amerika Tengah dan Meksiko yang masuk secara ilegal melalui perbatasan AS-Meksiko. Trump juga menargetkan akan mengurangi jumlah imigran dengan cara mengembalikan para imigran ilegal tersebut ke wilayah Meksiko selama peradilan sidang imigrasi para imigran tersebut berlangsung.¹³

Pada jurnal di atas, penulis dapat melihat bagaimana efek dari kepemimpinan Trump dalam menangani isu imigrasi melalui kebijakannya yang kontroversial dan berbeda dengan kebijakan presiden sebelumnya. Trump yang dikenal sebagai pemimpin anti-imigran berusaha untuk menurunkan para imigran ilegal yang ada di AS demi keamanan dan kepentingan nasional negaranya. Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Trump dalam

¹³ Mark Hoekstra dan Sandra Orozco Aleman, "Illegal Immigration: The Trump Effect", *National Bureau of Economic Research*, 2021

upaya menangani para imigran ilegal yang masuk melalui perbatasan yang cenderung melanggar hak asasi manusia para imigran tersebut.

Kajian pustaka ketiga, penulis merujuk pada jurnal yang berjudul *Migrant Protection Protocols and the Death of Asylum* yang ditulis oleh Austin Kocher pada tahun 2021. Dalam jurnal ini membahas mengenai kebijakan Migrant Protection Protocol (MPP) atau 'Remain in Mexico' yang diberlakukan pada Januari 2019-2021. Kebijakan MPP ini dibuat pada masa pemerintahan Trump yang berguna untuk memproses imigran ilegal yang ada di AS dan menurunkan tingkat populasi imigran ilegal di AS yang mengalami kenaikan. Kebijakan MPP ini sangat berdampak terhadap sistem imigrasi AS dan pengadilan imigrasi AS dalam menangani setiap isu-isu imigrasi yang terjadi di AS. Selain itu, kebijakan MPP ini dimaksudkan untuk mencapai kepentingan nasional negara AS dalam upaya perlindungan keamanan dan kesejahteraan hidup rakyat asli AS.

Sejak diberlakukan kebijakan MPP ini mengharuskan para imigran yang tiba di perbatasan ini untuk kembali dan menunggu di Meksiko selama proses pengadilan imigrasinya berlangsung. Hal ini merupakan salah satu bentuk tindakan serta strategi MPP bekerja dalam menekan angka kenaikan populasi imigran ilegal yang terjadi pada tahun 2018-2019. Walaupun kebijakan MPP ini berhasil menurunkan angka kenaikan imigran ilegal tersebut tetapi dalam pengimplementasiannya justru melanggar hak asasi manusia para imigran tersebut dalam mendapatkan hak-hak nya untuk mencari perlindungan dan kesejahteraan hidup di negara AS.

Dengan diberlakukannya kebijakan MPP ini berarti pemerintahan Trump berusaha untuk menghapuskan semua imigran yang ada di perbatasan AS-Meksiko dengan kata lain menciptakan “zona bebas imigran”. Kebijakan MPP akan efektif dalam upaya penurunan tingkat imigran ilegal yang ada di AS, tetapi hal tersebut justru akan menambah masalah baru dengan menempatkan para imigran tersebut di situasi yang berbahaya seperti terjadinya kekerasan, pemerkosaan dan lainnya. Sehingga pada prosedur yang dilakukan pemerintahan AS selama pengimplementasian MPP disebut melanggar HAM para imigran berupa ketiadaan tindakan perlindungan terhadap para imigran untuk mendapatkan hak-haknya.¹⁴

Dalam jurnal ini penulis dapat melihat bagaimana awal mula kebijakan MPP dibentuk dan bagaimana cara kerja kebijakan tersebut dalam upaya penanganan kenaikan imigran ilegal yang terjadi pada masa pemerintahan Trump. Kebijakan MPP dinilai bisa menurunkan tingkat imigran ilegal yang ada di AS, tetapi disatu sisi hal ini juga melanggar hak asasi manusia para imigran ilegal dan melanggar hukum imigrasi. Pada penelitian ini, peneliti akan lebih detail membahas serta mengidentifikasi kebijakan MPP pada masa pemerintahan Trump serta memaparkan bentuk-bentuk implementasi kebijakan MPP terhadap krisis migrasi ilegal yang terjadi di perbatasan AS-Meksiko..

Kajian pustaka keempat, penulis merujuk pada jurnal yang berjudul *The Influence of Personality on Presidential Leadership Style (with a Case Study of Donald Trump, 45th President of the United States)* yang ditulis oleh Anne Marie Griebel pada tahun 2021. Dalam jurnal ini menganalisis mengenai kepribadian

¹⁴ Austin Kocher, “Migrant Protection Protocol and the Death of Asylum”, *Journal of Latin American Geography*, Vol 20, 2021

seorang individu dapat mempengaruhi gaya kepemimpinannya. Sehingga penulis jurnal ini mengambil studi kasus bagaimana kepribadian dan karakteristik Trump dapat mempengaruhi gaya kepemimpinannya sebagai presiden AS yang ke-45.

Analisis psikologi politik berdasarkan pengalaman di masa lalu dapat mendasari pola kepribadian dan gaya kepemimpinan Trump. Karakteristik seorang individu dapat mempengaruhi orientasi peran di dunia politik domestik dan hubungan luar negeri sehingga hal ini akan berdampak terhadap keputusan yang akan diambilnya. Trump sangat cocok dianalisis gaya kepemimpinannya karena memiliki karakteristik yang unik berbeda dengan pemimpin AS terdahulu. Trump juga bukan berasal dari kalangan politikus tetapi berhasil menjadi presiden AS dengan berbagai kebijakan-kebijakannya yang kontroversial dan menarik perhatian publik.¹⁵

Pada jurnal ini penulis dapat melihat bagaimana karakteristik dan kepribadian dapat mempengaruhi gaya kepemimpinan. Hal ini cocok dengan profil Trump yang memiliki karakter seorang pemimpin yang unik dan cenderung tegas. Trump dengan gaya kepemimpinannya yang menantang keterbatasan tertutup dan cenderung egois dalam setiap keputusan dan kebijakan yang diambilnya. Hal ini menjadikan Trump cenderung fokus pada setiap kebijakan yang dibuatnya tanpa memperdulikan pendapat oranglain maupun unit politik lainnya. Dalam penelitian ini, penulis dapat mengidentifikasi kepribadian dan karakteristik yang dapat

¹⁵ Anne Marie Griebel, "The Influence of Personality on Presidential Leadership Style (with a Case Study of Donald J. Trump, 45th President of the United States), *College of Saint Benedict and Saint John's University*, 2021,1-77

mempengaruhi gaya kepemimpinan Trump dalam kebijakan Migrant Protection Protocol (MPP).

Kajian pustaka kelima, penulis merujuk pada artikel jurnal yang berjudul *Forced into Danger: Human Rights Violations Resulting from the U.S. Migrant Protection Protocol* pada tahun 2021. Dalam tulisan ini melaporkan adanya pelanggaran HAM yang terjadi akibat diberlakukannya kebijakan MPP pada masa pemerintahan Trump. Dalam kebijakan MPP tersebut menempatkan para imigran pada tempat yang berbahaya sehingga banyak terjadi kasus kekerasan, pemerkosaan, dan penganiayaan. Kebijakan MPP dalam pengimplementasiannya memaksa para imigran tersebut untuk kembali dan menetap sementara di Meksiko selama proses pengadilan imigrasi berlangsung dan juga hal ini termasuk kedalam pelanggaran terhadap HAM dan hukum imigrasi AS dan internasional. Kebijakan MPP saat ini sedang digugat di pengadilan AS karena melanggar undang-undang imigrasi AS, hukum administrasi dan hukum HAM internasional.

Walaupun telah dilakukan pengadilan banding federal, Mahkamah Agung telah mengizinkan kebijakan MPP untuk dilanjutkan. Pemerintah AS menjamin keamanan para imigran tersebut aman di Meksiko selama proses pengadilannya berlangsung. Namun pada Desember 2020 terdapat sekitar 1.314 laporan publik mengalami pemerkosaan, penculikan, penyiksaan terhadap para imigran akibat kebijakan MPP ini. Hal ini bertolak belakang dengan jaminan keamanan yang

disampaikan oleh pemerintahan AS yang justru menjadi upaya penyiksaan dan upaya penghapusan imigran yang ada di AS.¹⁶

Kesimpulan dari jurnal ini, penulis dapat menemukan dampak dari kebijakan MPP yang dibuat oleh Trump. Kebijakan MPP memang berhasil menurunkan tingkat imigran ilegal di AS tetapi hal ini justru menjadi pelanggaran HAM bagi para imigran. Pada penelitian ini, penulis akan membahas secara lebih detail mengenai dampak serta konsekuensi dari kebijakan MPP terhadap para imigran tersebut.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Idiosinkratik

Pengguna teori atau konsep sangat diperlukan untuk diperlukan untuk membantu penelitian dalam menganalisis permasalahan yang diangkat dan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ada di dalam sebuah penelitian. Agar dapat menjawab pertanyaan penelitian dalam permasalahan ini, peneliti menggunakan konsep Kebijakan Luar Negeri melalui pendekatan Idiosinkratik. Konsep ini penting untuk menjawab pertanyaan yang muncul dalam peneliti ini.

Kebijakan luar negeri merupakan tindakan-tindakan yang dirancang untuk memutuskan atau mengidentifikasi keputusan, strategi serta bentuk interaksi dengan negara lain dalam membahas suatu isu atau kasus. Kebijakan luar negeri merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan atau decision making yang dibuat untuk kepentingan nasional negara baik untuk kepentingan dalam maupun

¹⁶ "Forced into Danger: Human Rights Violations Resulting from the U.S. Migrant Protection Protocols," *Physicians for Human Rights*, Accessed Maret 10, 2024, <https://phr.org/our-work/resources/forced-into-danger/>

luar negeri. Kebijakan luar negeri dibuat untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang menyangkut mengenai keamanan, politik, ekonomi dan budaya suatu negara demi mencapai kepentingan nasionalnya. Kebijakan luar negeri juga menciptakan interaksi antar suatu negara dengan negara lain mengenai kepentingan negaranya masing-masing demi menjaga hubungan yang baik.

Pengambilan keputusan ini menentukan pilihan yang dibuat oleh komponen-komponen atau unit-unit politik domestik seperti anggota kongres, menteri, presiden dan lainnya yang akan berpengaruh pada tindakan negara dalam tingkat internasional demi mencapai kepentingan nasionalnya. Kebijakan luar negeri bukan hanya sekedar kepentingan nasional suatu negara namun juga sebagai bentuk alat dalam hubungan luar negeri antar sesama negara. Sehingga melalui hal tersebut suatu negara mengetahui bagaimana pola maupun bentuk politik luar negeri yang dianut oleh suatu negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya.

Menurut Joseph Frankel, kebijakan luar negeri terdiri dari keputusan dan tindakan yang sampai batas tertentu dalam melibatkan hubungan antar satu negara dengan negara lainnya.¹⁷ Cristopher Hill mendefenisikan kebijakan luar negeri sebagai penafsiran hubungan eksternal yang dilakukan oleh aktor independen (negara) dalam hubungan internasional.¹⁸ Dalam meinginterpretasikan kebijakan luar negeri, negara perlu mempertimbangkan kebijakan yang tepat untuk direalisasikan demi menjaga hubungan dengan negara lain serta mencapai

¹⁷ Bojang Aliou S, "The Study of Foreign Policy in International Relation", *Journal of Political Science & Public Affairs*, 2018

¹⁸ Derek Beach, "Analyzing Foreign Policy", 2012

kepentingan nasionalnya. Setiap negara tentunya memiliki pandangan yang berbeda dalam membuat atau mempertimbangkan kebijakan luar negerinya.

Ada tiga tingkatan analisis dalam merumuskan kebijakan luar negeri yaitu level sistem internasional, sistem negara dan level individu. Level analisis terkecil yaitu level individu yang berfokus pada perilaku seorang pemimpin negara atau disebut juga idiosinkratik. Idiosinkratik merupakan model analisa dalam mempengaruhi aktor individu dalam pengambil keputusan kebijakan luar negeri yang disebut dengan persepsi elit yang melekat pada seorang pemimpin. Model ini paling dasar namun penting karena bagaimana sistem internasional, negara, kebijakan luar negeri terbentuk dari pengaruh level individu tersebut.

Secara umum, idiosinkratik digunakan dalam menganalisis kepribadian maupun gaya kepemimpinan seorang pemimpin dalam upaya pengambilan keputusan. Konsep idiosinkratik seorang pemimpin akan mempengaruhi kebijakan atau politik suatu negara.¹⁹ Dalam buku yang berjudul “*Understanding Foreign Policy Decision Making*” karya Alex Mintz dan Karl DeRouen Jr tahun 2010 mengkaji tiga indikator penting dalam menganalisa model idiosinkratik yaitu:

1). Kepribadian Pemimpin (*Leader Personality*)

David Winter mendefenisikan bahwa kepribadian seseorang sebagai integrasi proses persepsi, ingatan, penilaian, pencarian tujuan, ekspresi dan regulasi emosional yang berpola individual. Dalam menganalisis kepribadian pimpinan memastikan bagaimana pemimpin tersebut dalam mengambil keputusan untuk

¹⁹ Steven Benedict Dyson, “Personality and Foreign Policy: Tony Blair’s Iraq Decisions”, *Foreign Policy Analysis*, 2006

menghadapi suatu masalah. Kepribadian ini membentuk cara seseorang dalam menghadapi emosinya terutama disaat pengambilan keputusan. Winter membagi kepribadian menjadi empat elemen yaitu: temperamen, kognisi, motif, dan konteks sosial.²⁰

2). Gaya Kepemimpinan (*Leadership Style*)

Individu yang kuat memiliki wewenang dalam membuat keputusan atau kebijakan. Analisis gaya kepemimpinan ini bertujuan dalam melihat bagaimana pemimpin tersebut dalam memutuskan sesuatu maupun tindakan yang dilakukan. Pemimpin yang mempunyai motivasi kuat dalam tugas cenderung tidak membutuhkan banyak koalisi domestik atau internasional sebelum mengambil tindakan maupun keputusan. Di sisi lain, ada pemimpin yang cenderung berhati-hati dalam membuat keputusan dengan cara berkonsultasi dan berdiskusi dengan koalisi internasional. Menurut Alex Mintz dalam menganalisis gaya kepemimpinan seorang pemimpin dapat dianalisis dengan berbagai macam yaitu: *Goal-driven vs Context-driven, Task-oriented vs Task-motivated, Task-oriented vs Context-oriented*.

Gaya kepemimpinan *Goal-Driven* cenderung lebih menantang kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam mengambil keputusan kebijakan luar negeri demi tercapainya tujuan dalam kebijakan tersebut. Hal tersebut dilakukan demi tercapainya kepentingan nasional tanpa harus melihat kendala-kendala yang akan terjadi. Pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang seperti ini cenderung tidak takut terhadap resiko yang akan dihadapi. Pemimpin *Goal-driven* tidak terbuka terhadap

²⁰ Alex Mintz dan Karl DeRoun Jr, “*Understanding Foreign Policy Decision Making*,” (CAMBRIDGE,2010), 113-114

informasi baru dan cenderung tertutup agar setiap keputusan yang diambilnya dapat berjalan tanpa harus melibatkan pendapat unit-unit politik yang lain namun sebaliknya *Context-driven* cenderung mencari informasi baru dalam mendukung pengambilan keputusan dan kebijakan.

Gaya kepemimpinan *Task-oriented* tidak mengubah ideologinya dalam pembuatan serta perancangan setiap keputusan maupun kebijakan yang akan diberlakukan dalam menangani suatu isu. Pemimpin yang memiliki gaya *Task-oriented* menganggap dirinya memiliki wewenang yang tinggi dalam pengambilan keputusan dibandingkan unit politik lain seperti anggota kongres, menteri luar negeri dan sebagainya. Sedangkan pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan *Task-motivated* cenderung kurang membutuhkan koalisi internasional sebelum mengambil tindakan maupun mempertahankan kebijakannya.

Gaya kepemimpinan *Task-oriented* yang berorientasi pada tugas namun tidak peka terhadap konteks politik yang ada sebelumnya. Pemimpin yang justru berpegang teguh terhadap pemikirannya dan tidak terlalu memperdulikan pendapat maupun kritik dari pihak lain mengenai keputusan yang sedang diambil. Sebaliknya *Context-oriented* sangat berorientasi pada tingkat kepekaan dalam konteks politik untuk mencari perlindungan dari setiap kendala-kendala yang terjadi sehingga menghindari kemungkinan resiko yang akan terjadi kedepannya.²¹

²¹ Alex Mintz dan Karl DeRoun Jr, “*Understanding Foreign Policy Decision Making*,” (CAMBRIDGE,2010), 114-115

3). Tipe-Tipe Pemimpin (*Leadership Type*)

Alex Mintz juga mengutip karya M. Herman yang berkontribusi dalam teori pengambilan keputusan yang mengelompokkan berbagai tipe-tipe pemimpin menjadi empat kategori yaitu: *Crusader*, *Strategic*, *Pragmatic* dan *Opportunistic*.

Pemimpin dengan tipe *Crusader* merupakan pemimpin yang menentang batasan politik namun tertutup terhadap informasi-informasi baru. Pemimpin yang memiliki tipe ini tidak membatasi diri dalam mengejar visinya. Pemimpin dengan tipe *Strategic* ini menentang kendala namun terbuka terhadap informasi baru. Tipe pemimpin secara teknis mengetahui hal-hal yang harus dicapai. Tipe pemimpin ini juga berani secara politik namun berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Tipe pemimpin *Pragmatic* ini menghargai batasan-batasan politik namun tertutup terhadap informasi. Pemimpin dengan tipe ini membuat kebijakan sesuai dengan pandangannya sendiri. Terakhir, pemimpin dengan tipe *Opportunistic* cenderung sadar akan batasan politik dan mengejar informasi. Pemimpin ini menggunakan pendekatan negosiasi sebagai komponen dalam gaya kepemimpinannya. Dalam politik pemimpin ini justru menghindari dari tindakan mengambil resiko dari aktor-aktor penting.²²

Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan satu indikator idiosinkratik yaitu gaya kepemimpinan. Penulis menggunakan pendekatan melalui gaya kepemimpinan Donald Trump dalam pengambilan serta pengutusan kebijakan Migrant Protection Protocol (MPP) atau '*Remain in Mexico*' yang diresmikan pada

²² Alex Mintz dan Karl DeRoun Jr, "*Understanding Foreign Policy Decision Making*," (CAMBRIDGE,2010), 115-116

Januari 2019 dalam upaya menangani imigran ilegal yang masuk melalui perbatasan AS-Meksiko. Trump yang dikenal dengan latar belakang sebagai seorang pengusaha dan bukan dari kalangan politikus berhasil menarik perhatian publik dengan kebijakannya yang kontroversial dan cenderung tegas dalam penanganan isu imigrasi. Hal tersebut dilakukan dalam upaya menjaga dan melindungi keamanan negaranya melalui visi “*American First*” yang disampaikan sewaktu masa kampanye tahun 2016.

1.8 Metode Penelitian

Secara epistemologis, metodologi merupakan suatu langkah yang digunakan dalam menggambarkan bagaimana fenomena Hubungan Internasional tersebut dapat diperoleh.²³ Metode penelitian merupakan kumpulan langkah-langkah yang digunakan dalam memecahkan suatu permasalahan.²⁴ Dalam penelitian ini, peneliti memakai metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat induktif dan peneliti umumnya mendalami makna dan persepsi dalam situasi tertentu.²⁵

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi suatu permasalahan penelitian agar mudah dipahami melalui penerapan konsep yang sesuai dengan fenomena yang terjadi. Jenis Penelitian yang peneliti gunakan yaitu

²³ Mochtar Mas’oed, “Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi”, (LP3ES:Jakarta, 1990):3

²⁴ Mochtar Mas’oed, “Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi,” LP3ES:Jakarta, 1990):3

²⁵ Haradhan Kumar Mohajan, “Qualitative Research Methodology in Social Science and Related Subject”, *Journal of Economic Development, Environment and people*, (2018):1

penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini akan diidentifikasi secara deksriptif terkait fenomena yang akan diteliti melalui gaya kepemimpinan dan kebijakan luar negeri yang diambil oleh pemimpin negara. Alasan peneliti memilih jenis penelitian ini agar dapat menjelaskan bagaimana gaya kepemimpinan Donald Trump dalam kebijakan Migrant Protection Protocol (MPP) di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko.

1.8.2 Batasan Penelitian

Batasan penelitian digunakan sebagai acuan bagi peneliti untuk tetap fokus dalam meneliti sehingga cakupan penelitian akan tetap tertata sesuai batasan yang telah ditetapkan. Adapun batasan penelitian yang telah diteliti yaitu tahun 2019 hingga 2021. Rentang waktu tersebut dipilih karena pada tahun 2019, AS dibawah pemerintahan Donald Trump mulai mengeluarkan kebijakan Migrant Protection Protocol (MPP) yang dibuat untuk menangani kenaikan imigran ilegal yang terdapat pada perbatasan AS-Meksiko. Pada tahun 2021, terjadi penurunan imigran ilegal yang masuk ke AS melalui perbatasan sebagai dampak dari pengimplementasian kebijakan MPP dan juga sebagai akhir dari masa pemerintahan Donald Trump sebagai Presiden AS yang ke-45.

1.8.3 Unit dan Level Analisis

Unit analisis merupakan unit yang tindakannya akan dianalisis dan diidentifikasi. Unit analisis disebut juga dengan variabel dependen.²⁶ Unit analisis dalam penelitian ini adalah Donald Trump. Unit eksplanasi adalah unit yang

²⁶ Mochtar Mas'ood, "Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi", (LP3ES:Jakarta, 1990):43-44

mempengaruhi efek terhadap unit analisis atau yang disebut variabel independen.²⁷

Unit eksplanasi dalam penelitian ini yaitu kebijakan Migrant Protection Protocol (MPP).

Menurut John Spainer terdapat tiga tingkat analisis yaitu tingkat sistem internasional, tingkat negara-bangsa dan tingkat individu.²⁸ Dalam Penelitian ini, peneliti akan menggunakan tingkat analisis pada individu dalam melihat gaya kepemimpinan Donald Trump dalam kebijakan Migrant Protection Protocol (MPP) yang mana kebijakan MPP ini digunakan dalam menangani krisis imigran ilegal yang ada di perbatasan AS-Meksiko.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder berupa studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan ini merupakan proses identifikasi sumber data berupa pendapat para ahli yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.²⁹ Sumber data yang digunakan dalam menunjang studi kepustakaan dapat berupa buku, laporan, artikel jurnal, dan website. Dalam penelitian ini, peneliti mengaplikasikan sumber referensi berupa buku, jurnal, artikel jurnal, website pemerintah, hingga portal berita.

Adapun sumber-sumber informasi serta data-data yang diperoleh dari jurnal ilmiah dalam menyusun penelitian ini yaitu: *SAGE, U.S Departement of Homeland Security, Journal of Rural Social Science, College of Saint Benedict and Saint*

²⁷ Mochtar Mas'oeed, "Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi", (LP3ES:Jakarta, 1990):43-44

²⁸ Mochtar Mas'oeed, "Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi"

²⁹ Mary W.George,"The Elements of Library Research:What Every Student Needs to Know", (Princeton University Press,New Jersey:2008):8

John's University, UC Irvine Law Review, Cambridge University Press, Journal of Latin America Geography, IOSR Journal of Humanities and Social Science, Journal on Migration and Human Security. Adapun situs website yang menjadi sumber keterangan dan data yaitu: *Human Right Watch, American Immigration Council, ACLU New Mexico, WOLA, Homeland Security, Migration Policy Intitute, BBC, CSR Report for Congress, Physicians for Human Rights, U.S Immigration and Custom Enforrcement.*

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan bagi peneliti dalam merancang data secara teratur dalam menjelaskan suatu fenomena.³⁰ Dalam menganalisis data, peneliti akan menggunakan beberapa tahapan analisis data yang ditulis oleh Matthew B. Milles dan A. Michael Hubberman dalam tulisannya *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook, Second Edition* yang terdiri dari tiga tahapan yaitu:

1). Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap awal dalam penelitian berupa preferensi, penegasan, penyederhanaan, pemisahan, dan perubahan data dari berbagai publikasi yang diambil untuk mendukung penelitian. Peneliti akan menggunakan beberapa kata kunci untuk memperkuat data dalam penelitian ini berdasarkan topik penelitian yaitu Pelantikan Donald Trump, Gaya Kepemimpinan Donald Trump, Kebijakan Migrant Protection Protocol (MPP), perbatasan AS-Meksiko. Sehingga

³⁰ Barbara Kawulich, "Data Analysis Technique in Qualitative Research, 2004 " *Journal of Research Education*, No. 14: 96-113

peneliti lebih mudah memaparkan data yang relevan dengan menggunakan kata kunci yang bersangkutan dalam proses penelitian.

2). Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahapan lanjutan dari proses analisis data dalam penelitian. Pada proses penyajian data ini peneliti akan merangkai berbagai data-data yang sudah terkumpul untuk disajikan dalam penelitian.

3). Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian. Setelah menyusun berbagai pemahaman dari data-data yang sudah terkumpul, peneliti akan menarik kesimpulan dari keseluruhan analisis yang telah ditampilkan.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penelitian yang akan dilakukan.

BAB II KEPEMIMPINAN DONALD TRUMP SEBAGAI PRESIDEN AMERIKA SERIKAT

Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang hidup serta latar belakang karir Donald Trump sebelum masuk ke dunia politik. Penulis juga menjelaskan perjalanan Donald Trump ketika mencalonkan diri menjadi presiden Amerika Serikat. Selain itu, penulis juga akan membahas kepribadian Trump sebagai seorang Trump dalam upaya pengambilan keputusan.

BAB III KEBIJAKAN MIGRANT PROTECTION PROTOCOL (MPP) DI MASA PEMERINTAHAN DONALD TRUMP

Pada bab ini akan membahas tentang Kebijakan Migrant Protection Protocol (MPP) yang dibuat oleh Donald Trump dalam mengatasi Imigran ilegal yang ada di perbatasan AS-Meksiko.

BAB IV ANALISIS GAYA KEPEMIMPINAN DONALD TRUMP DALAM KEBIJAKAN MIGRANT PROTECTION PROTOCOL (MPP) DI PERBATASAN AMERIKA SERIKAT-MEKSIKO

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai analisis Gaya Kepemimpinan Donald Trump dalam Kebijakan Migrant Protection Protocol (MPP) di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan serta saran terkait kelanjutan penelitian ini.

